

DEMOKRATISASI DI INDONESIA

(Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Humaniora (S.Hum)**

Oleh:

Sapta Wahyono
NIM: 04121762

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Drs. Lathiful khuluq, M.A. Ph.D. B.S.W
JURUSAN SEJARAH & KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 P/F. 0274-53949

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi Sdr. Sapta Wahyono

Kepda
Yth. Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini, sesuai dengan Surat Penetapan Pembimbing yang ditandatangani selaku oleh Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga nomor UIN.02/SKI/PP.00/1069/2010 tanggal 20 Mei 2010, berkewajiban untuk memberikan bimbingan penulisan skripsi terhadap mahasiswa:

Nama	: Sapta Wahyono
NIM	: 04121762
Jurusan	: Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul	: Demokratisasi di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid)

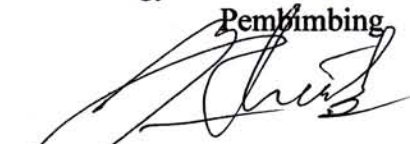
Berkaitan dengan tugas tersebut maka saya telah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya sampai terselesaikannya skripsi ini. saya selaku pembimbing mengembalikan sepenuhnya pertanggungjawaban terhadap kebenaran dan otentisitas skripsi kepada mahasiswa tersebut di atas, dan berpendapat skripsi ini sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam. Oleh karena itu saya berharap skripsi tersebut dapat segera disidangkan dalam munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta 29 Oktober 2010

Pembimbing



Drs. Lathiful khuluq, M.A. Ph.D. B.S.W
NIP. 196806101992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949
Web: <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail: adabuin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/SKI/PP.00.9/ 2618 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Demokratisasi di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Sapta Wahyono**
N I M : **04121762**
Telah dimunaqasyahkan pada : **12 November 2010**
Nilai Munaqasyah : **B**
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

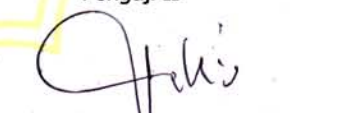
Ketua Sidang


Dr. Lathiful Khuluq, M. A
NIP. 19680610 199203 1 003

Penguji I

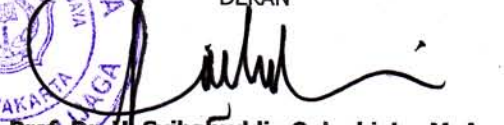

Drs. Badrun Alaina, M. Si.
NIP: 19631116 199203 1 003

Penguji II


Dr. Muhammad Wildan, M A
Nip:19710403 199603 1 001



Yogyakarta, 03 Desember 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya
DEKAN


Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.
NIP. 19520921 198403 1 001

HALAMAN MOTTO

He whose present day is better than yesterday is succesful,

he whose present day is like yesterday is loast.

he whose present day is worse than yesterday is cursed.

(Al-Hadist)

“I am slowly walker, but I am never come back”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Papi Kamsuri Hemidjaja (alm)*
- ❖ *Mami Zullaidar*
- ❖ *Kakak-kakak Tercinta:*
 1. *Mas Yoyok*
 2. *Mbak Elvi*
 3. *Mas Hendi*
 4. *Mas Riyadi*
 5. *Mas Yayan, dan*
 6. *Mbk Wiwid*

ABSTRAKSI

DEMOKRATISASI DI INDONESIA

(Studi Komparasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid)

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) banyak menyuarakan pentingnya demokrasi di Indonesia serta merekonstruksi pemahaman keagamaan yang dapat mendukung terciptanya demokrasi, dan pengembangan Islam yang ramah dengan budaya lokal. Gus Dur mencoba untuk menetralsir ketegangan hubungan Islam dan negara terkait dengan penolakan ormas-ormas Islam terhadap pancasila sebagai asas organisasinya. Gagasan ini berangkat dari komitmen Gus Dur yang tinggi terhadap nilai-nilai universal Islam, sebagai sesuatu yang olehnya dianggap mempunyai kekuatan yang massif untuk membangun basis-basis kehidupan politik yang adil, egaliter, dan demokratis. Sedangkan bagi Nurcholish Madjid (Cak Nur) Islam dan demokrasi bukan pilihan yang delematis dan berkonsekuensi pada pecahnya kepribadian, justru sebaliknya Islam dan demokrasi harus dikombinasikan, baik dalam pengertian prinsip maupun prosedur. Cak Nur mencoba mengawinkan antara demokrasi dan Islam yang menghasilkan demokrasi dengan paradigma Islam. Cak Nur berkeyakinan bahwa tanpa Islam, demokrasi akan kekurangan landasan, nafas, dan roh, sebaliknya tanpa demokrasi, Islam akan kesulitan mewujudkan tujuan dasarnya sebagai sarana bagi kebaikan untuk semua.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah dan biografi. Data dikumpulkan dari bahan pustaka seperti buku, majalah, dan lain-lain. Data yang didapat kemudian diuji kredibilitasnya melalui kritik internal dan eksternal sehingga akan mendapatkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data-data yang telah diuji diinterpretasikan untuk menjadi karya sejarah.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Menurut Gus Dur demokrasi hanya bisa dibangun di atas landasan pendidikan yang kuat, dengan ditopang oleh tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai, sedangkan menurut Cak Nur demokrasi harus dipandang sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Mengenai hubungan demokrasi dan Islam Gus Dur berpendapat bahwa Islam dan pola implementasinya dalam konteks negara dan bangsa, sangat memperhatikan konteks politik dan sosiologis suatu bangsa dan masyarakat. Karena ia lebih menekankan substansi ajaran Islam daripada simbol-simbol formalnya. Adapun menurut Cak Nur Islam sendiri sebenarnya memiliki konsep tentang demokrasi, yaitu lewat ajaran yang dalam Islam disebut dengan *syuro* (musyawarah). Baik Gus Dur maupun Cak Nur sependapat bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia, dan keduanya juga berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam.

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمّدا عبده ورسوله اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أمّا بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan taufîq-Nya sehingga pelunis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada umatnya sehingga menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai khalîfah di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan sekretaris Jurusan Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Lathiful Khuluq, M.A. Ph. D. B.S.W sebagai pembimbing, yang telah membantu dan memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Syamsul Arifin, M.S.I, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan bimbingan bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta

5. Bapak dan Ibu Dosen Khususnya di Lingkungan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama berstudi.
6. Semua sanak-saudara yang tiada henti menanti kelulusan penulis, dan terus memberi support agar terus berjuang.
7. Teman-teman seperjuangan di lingkungan Jurusan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin disebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya, penulis berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kita semua.

Âmîn Yâ Rabbal‘âlamîn.

Yogyakarta, 29 Oktober 2010 M

Penulis

Sapta Wahyono
Nim: 04121762

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Landasan Teori.....	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II. BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID DAN NURCHOLISH

MADJID.....	20
A. Biografi Abdurrahman Wahid.....	20
1. Keluarga	20
2. Riwayat Pendidikan	26
3. Pengalaman dan Karya-karya Ilmiah	27

B. Biogarfi Nurcholish Madjid	30
1. Keluarga	30
2. Riwayat Pendidikan.....	33
3. Pengalaman dan Karya-karya Ilmiah	34
 BAB III. KONSEP-KONSEP DASAR PANDANGAN ABDURRAHMAN	
WAHID DAN NURCHOLISH MADJID TENTANG DEMOKRASI.	37
A. Demokrasi dan Islam	37
B. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	45
C. Demokrasi dan Supremasi Hukum	49
 BAB IV PANDANGAN KRITIS ABDURRAHMAN WAHID DAN	
NURCHOLISH MADJID TENTANG DEMOKRATISASI DI	
INDONESIA	53
A. Masa Orde Lama	53
B. Masa Orde Baru	56
C. Masa Orde Reformasi	62
D. Komparasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid	
Tentang Demokratisasi di Indonesia.....	65
 BAB V. PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Subtansi demokrasi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk memilih pemimpin atau sistem politik formal secara bebas dan sekaligus untuk menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi. Penulis Mesir Fahmi Huwaydi yang tidak terlalu terikat dengan definisi-definisi akademis menulis tentang demokrasi, sebagai berikut:

Subtansi demokrasi -keluar dari definisi-definisi dan istilah-istilah akademis- menghendaki masyarakat untuk memilih seseorang yang akan memerintah mereka serta mengatur urusan mereka, dan tidak menghendaki mereka memilih seorang penguasa atau sistem yang tidak mereka sukai. Selain itu, menurut demokrasi, mereka harus memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada penguasa apabila ia melakukan kesalahan, dan menurunkannya apabila melakukan penyelewengan. Dan mereka tidak boleh diarahkan kepada paham-paham, metode-metode ekonomi, sosial, budaya, atau politik yang tidak mereka ketahui dan setuju¹.

Ahmad Syafii Maarif mempunyai pendapat lain, menurutnya bahwa demokrasi dalam praktik di mana pun di muka bumi selalu menuntut tiga atau empat syarat yang saling melengkapi, yaitu; rasa tanggungjawab, lapang dada, rela menerima kekalahan secara sportif, dan tidak membiarkan kesadaran membeku. Demokratisasi memang melelahkan, tetapi gagasan kembali kepada sistem dinastik, otoritarian dalam berbagai format, hanya akan mempertinggi

¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, Cet. 1, (Bandung: PT. Mizan, 2009), hlm. 148-149.

tempat jatuh. Oleh sebab itu pilihan pada demokrasi adalah pilihan yang tepat, sekalipun harus belajar dari berbagai kegagalan yang telah dilalui selama ini.²

Indonesia sebagai bangsa termasuk yang beruntung karena sejak awal mayoritas rakyatnya telah memilih sistem demokrasi, dengan rakyat yang mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat didikan yang diberikan oleh para pemimpinnya. Kenyataan ini merupakan modal penting untuk dikembangkan lebih jauh secara bertanggung jawab, adapun buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan pemimpin itu sendiri dalam praktik politik, dalam sebuah fakta yang tidak boleh diabaikan. Upaya perbaikan sistem ini harus dilakukan secara terus-menerus tanpa merasa bosan, sekalipun hasilnya sering menyakitkan dan melelahkan, secara ringkas dapat digambarkan bahwa pasang-surutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan perilaku para elitnya, apakah mereka berhati lapang, atau malah berhati sempit dan tidak bertanggung jawab.

Proklamasi bertaut rapat dengan ruh dan cita-cita demokrasi yang sehat, maka setiap kecenderungan otoritarian dalam politik pasti mengundang perlawanan, cepat atau lambat, keras atau lunak, tergantung situasi yang melatarinya. Betapun demokrasi belum berbuat banyak untuk kepentingan kesejahteraan rakyat secara umum, jangan sampai muncul nafsu untuk

² *Ibid*, hlm. 142.

membunuhnya, lalu mendesak agar kembali kepada lawannya berupa sistem otoritarian.

Demokratisasi di Indonesia telah menjadi salah satu topik penting dalam sejarah, para pendiri republik seperti Soekarno dan Hatta telah merumuskan berbagai model demokrasi yang diperuntukkan bagi praktik politik di Indonesia. Soekarno dengan falsafah sinkretismenya dan Hatta dengan kekagumannya pada sosial-demokrasi.

Deretan eksperimen untuk melaksanakan pikiran-pikiran kenegaraan para *founding father* merupakan proses demokratisasi³, di antaranya penerapan model-model demokrasi sebagai berikut; Model demokrasi *pertama*, yaitu demokrasi parlementer yang berlangsung antara 1950-1959 adalah bentuk demokrasi cangkokan yang bersal dari negara asing, dalam wajah demokrasi ini semangat perpecahan yang didorong oleh ketatnya subjektivitas kelompok.

Model demokrasi yang *kedua*, yaitu demokrasi terpimpin yang berlangsung antara 1959-1965, demokrasi ini bersifat monolitis kekuasaan yang bersumber pada figur pesona kharismatik (Soekarno) model demokrasi ini adalah bentuk reaksi terhadap model demokrasi yang pertama. Model demokrasi *ketiga* yaitu demokrasi pancasila pada masa orde baru, pada masa ini demokrasi yang diproduksi lebih bersifat *government centered* (terpusat pada pemerintahan) yang

³ Nurcholish Madjid, *Indonesia kita*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 89

tidak terkonsepkan sebagai suatu hubungan kekuasaan yang *people centered* (terpusat pada rakyat).

Model-model demokrasi di atas, dimaksudkan untuk membawa konsep demokrasi lebih dekat kepada kultur masyarakat tertentu dan sebagian lagi dimaksudkan untuk menjustifikasi sistem politik yang diajukan oleh pemerintah. Pada sisi lain menunjukkan bahwa konsep demokrasi sebagai ide universal diterjemahkan oleh masing-masing negara yang sepakat dengan demokrasi sesuai dengan kebutuhan budaya politik lokal, sebab demokrasi tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi didefinisikan.⁴

Kehidupan politik demokratis di Indonesia berlangsung tidak terlalu lama, hanya berlangsung antara tahun 1950-1959. lemahnya persyaratan sosial-ekonomi dan infrastruktur ikut mempengaruhi pendeknya usia demokrasi. Demikian pula tipologi elite politik nasional yang ada belum tertransformasikan dari *-disunified* ke *consensually unified elite*- suatu kondisi yang menyulitkan tercapainya kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan di antara mereka. Masa setelah dekret Presiden Soekarno (1959) untuk kembali kepada UUD 1945, dengan demikian konstituante menjadi tidak diperlukan lagi dan tidak pernah ditandai dengan adanya kehidupan politik yang demokratis. Pemerintah Presiden

⁴ Eep Saifullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 5.

Soekarno dan Presiden Soeharto pada dasarnya bersifat tidak kompetitif (otoriter). Yang membendakan keduanya adalah pembangunan ekonomi dengan seluruh implikasi sosial-politiknya yang berjalan relatif lebih cepat pada masa Soeharto.⁵

Hatta mempunyai keyakinan yang kuat bahwa demokrasi tidak mungkin tersungkur selama-lamanya di Indonesia, keyakinan tersebut harus dipegang sebagai sebuah kebenaran politik.⁶ Keyakinan tentang “Lenyap demokrasi berarti lenyapnya Indonesia merdeka” adalah warisan Hatta yang sangat mahal harganya bagi generasi yang datang belakangan untuk senantiasa dipegang dan renungkan. Ringkasnya adalah bahwa Indonesia ke-depan harus menyatakan secara sadar bahawa sistem demokrasi adalah pilihan satu-satunya, orang tidak boleh berpaling lagi kepada sistem yang lain. Formula singkatnya adalah *Sayonara* semua sistem politik yang memasung kebebasan warga, hanya dalam iklim kebebasan kita dapat menjadi manusia penuh.

Secara prosedural Indonesia sudah bertransisi dari rezim otoritarianisme menuju demokrasi meskipun belum terkonsolidasi secara stabil, pemilu tahun 1999 dan 2004 menjadi prasyarat awal gelombang demokratisasi di Indonesia.

⁵ Bahtiar Effendy, “Demokrasi dalam Agama; Eksistensi Agama dalam Politik Islam” dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta : Paramadina, 2005), hlm. 167.

⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, hlm. 162-163.
Ungkapan klasik Hatta yang penuh tenaga tentang demokrasi ; “Pengakuan di muka Tuhan akan berpegang pada Pancasila itu mudah diabaikan. Dan di situ pulalah terletak jaminan bahwa demokrasi tidak akan lenyap di Indonesia.”

Indonesia juga mulai bergerak untuk memenuhi sebagian dari delapan syarat institusional yang diperlukan bagi demokrasi, seperti dituangkan Robert Dahl, ahli kawakan demokrasi dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, *Polyarchy*, yakni; (1) kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, (2) kebebasan berekspresi, (3) hak memberikan suara, (4) eligibilitas untuk menduduki jabatan publik, (5) hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara, (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, (7) pemilu yang bebas dan adil, dan (8) institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah bergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

Dalam konteks Indonesia, pemilu 2004 secara langsung, bebas dan adil, menjadi model dan laboratorium baru bagi berseminya gelombang reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Dari sudut pemerintahan, terpilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat menandai babak baru demokratisasi, pemilihan presiden dan wakilnya untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia tersebut berjalan relatif damai dan demokratis.⁷

Wacana demokrasi merupakan wacana yang marak dibicarakan dan dikaji dari berbagai sisi mulai ekonomi, politik, kebudayaan, agama dan sebagainya. Perkembangan ini bukan saja menggembirakan, tetapi juga membutuhkan tingkat

⁷ Sukidi Mulyadi, "Defisit Demokrasi di Dunia Islam" dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta : Paramadina, 2005), hlm. 237-238.

pemahaman, kesadaran, dan proyeksi jelas dengan agenda demokrasi. Dalam beberapa segi, pengertian demokrasi tidak pernah bisa “diseragamkan” dan memang harus demikian. Artikulasi-artikulasi demokrasi dari politisi, akademisi dan masyarakat awam, menjadi nilai positif dalam khazanah perbendaharaan pengertian demokrasi. Namun parsialisasi ini juga cukup mengkhawatirkan bila pada akhirnya justru menguburkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari demokrasi.

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, dengan beberapa alasan; *Pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga* Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*). *Keempat*, demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.⁸ Akan tetapi, Abdurrahman Wahid menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan sebagai upaya demokratisasi. Abdurrahman Wahid mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternatif justru akan kehilangan relevansinya, menurutnya demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat.⁹ Dalam proses ini semua masyarakat harus

⁸ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 184

⁹ Al-Zastrow Ng, *Gus Dur, Siapa Sih Sampean?; Tafsir Teoritis Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta; Erlangga, 1999) hlm.252.

dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi, dan itulah hakekat demokratisasi.

Nurcholish Madjid memiliki pandangan dan pemahaman yang hampir sama dengan Abdurrahman Wahid, yaitu tentang bagaimana peran agama yang tidak boleh berjalan sendiri dalam demokratisasi, karena agama tidak akan terlepas dari aturan-aturan formal sebuah negara, begitu pula sebaliknya negara tidak bisa berjalan tanpa agama (masyarakat adalah pengikut sebuah agama). Untuk lebih jauhnya pandangan Nurcholish Madjid tentang demokrasi dapat dipahami dari tulisannya tentang paham kemajemukan sebagai berikut:

Demokrasi menuntut adanya pandangan pribadi, lebih-lebih pada setiap pribadi para pemimpin, suatu pandangan yang selaras dengan keharusan berendah hati sehingga mampu melihat diri sendiri berkemungkinan salah, dan orang lain yang berbeda dengan dirinya berkemungkinan benar. Demokrasi tidak mungkin disertai dengan absolutisme dan sikap-sikap mau benar sendiri lainnya. Demokrasi mengharuskan adanya sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai antara sesama warga masyarakat. Di bawah pertimbangan tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum, demokrasi tidak membenarkan adanya sikap *all or nothing* (semua atau tidak) *take it or leave it* (ambil, atau tinggalkan) yaitu sikap-sikap serba kemutlak-mutlakan. Sebaliknya, seperti dalam kaedah Fiqih Islam (*ushul-fiqh*), yang berlaku ialah “yang tidak semua didapat tidak semua harus ditinggalkan”¹⁰.

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa demokrasi adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak hanya paksaan dalam melakukan segala sesuatu yang juga disertai sikap tanggungjawab. Pandangan Nurcholish Madjid dalam diskursus demokrasi ke-Indonesiaan sangat terasa pengaruhnya, khususnya sejak awal tahun 1970-an tentang gagasan sekularisasi dan “*Islam, Yes; Partai*

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Indonesia kita*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 89

Islam No” dengan adanya pengistilahan tersebut banyak tokoh yang tidak sepakat karena hal tersebut dianggap sebagai pengukuhan Orde Baru sebagai Status Quo.¹¹

Munurut Nurcholish Madjid, demokrasi memerlukan adanya kesediaan setiap pesertanya untuk menerima kenyataan bahwa keinginan seseorang tidak mungkin seluruhnya diterima oleh semua orang dan dilaksanakan, melainkan sebagian saja.¹² Selain itu juga dia meletakkan demokrasi sebagai “*catch word*” dalam suatu program politik yang akan memberi inspirasi kepada dan mengingatkan untuk selalu berusaha mencapai sesuatu yang lebih baik dari keadaan sekarang

Perdebatan mengenai demokratisasi di Indonesia sangat menarik untuk dikaji, karenanya penyusun merasa terpanggil untuk mengkaji topik tersebut dengan coba mengetengahkan persamaan maupun perbedaan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid kaitannya dengan proses demokratisasi di Indonesia, hubungan demokrasi dan Islam, hubungan demokrasi dan hak asasi manusia, dan demokrasi dan supremasi hukum.

¹¹ Masykuri Abdullah, *Demokarasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. VII.

¹² Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 98-99

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini nantinya adalah tentang dasar-dasar yang memunculkan pikiran-pikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang demokratisasi di Indonesia yang meliputi; latar belakang pendidikan, baik formal dan lingkungan keluarga, pandangan kedua tokoh tersebut di atas tentang demokratisasi di Indonesia, hubungan demokrasi dan Islam di Indonesia, demokrasi dan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Untuk memudahkan dalam menguraikan pembahasan, penelitian ini akan menjawab pertanyaan di bawah ini;

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia?
2. Bagaimana konsep Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang hubungan demokrasi dan Islam, demokrasi dan hak asasi manusia, serta demokrasi dan supremasi hukum?
3. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan mengajukan beberapa rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui latar belakang pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana konsep Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang hubungan demokrasi dan Islam, demokrasi dan hak asasi manusia, dan demokrasi supremasi hukum.
3. Mengetahui Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah khasanah studi sejarah terkait dengan demokratisasi di Indonesia dan penulisan ini diharapkan bisa menambah informasi bahwa dalam ajaran Islam juga terdapat nilai-nilai demokrasi, sehingga tidak identik dengan produk pemikiran Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai demokratisasi di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya oleh banyak pemikir muslim kontemporer, di antaranya Ahmad Syafii Maarif adalah bukunya Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*. Dalam buku tersebut Ahmad Syafii Maarif banyak mengulas tentang proses demokratisasi itu sendiri di Indonesia dan pentingnya demokrasi untuk dipertahankan sebagai satu-satunya sistem pemerintahan, sebab demokrasi merupakan sistem yang sangat sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain Ahmad Syafii Maarif tokoh lain yang juga mengulas tentang demokratisasi di Indonesia adalah Bahtiar Effendi dalam tulisannya “Demokrasi dan Agama; Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed) *Islam Negara dan Civil Society Gerakan Pemikiran Islam Kontemporer*. Dalam karyanya tersebut Bahtiar Effendy mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia dengan mengkaitkan pada agama (Islam)

Adapun pemikiran tentang demokratisasi di Indonesia yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid maupun Abdurrahman Wahid juga telah banyak ditulis oleh banyak peneliti baik dalam bentuk artikel, makalah, maupun tesis di antaranya; Muhammad Hari Zumahar dengan bukunya *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Poitik Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang biografi Nurcholish Madjid dan mendeskripsikan persepsi keagamaan Nurcholish Madjid yang menjadi landasan dalam merespon dinamika politik yang berkembang termasuk demokrasi yang ada di Indonesia meskipun masih bersifat umum.

Siti Nadroh dalam tesisnya di Pasca Sarjananya di IAIN (sekarang UIN) Jakarta yang berjudul *Wacana Politik dan Keagamaan Nurcholish Madjid* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1991). Tesis tersebut mendeskripsikan persepsi keagamaan Nurcholish Madjid yang menjadi landasan dalam merespon dinamika politik yang berkembang. Literatur lain adalah berupa buku yang

berjudul; *Teologi Inklusif Cak Nur* yang dibukukan oleh Sukidi, buku tersebut merupakan kumpulan artikel-artikel yang pernah dimuat dalam harian *Kompas* dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2001 dengan pengantar Nurcholish Madjid sendiri. Dalam buku tersebut Sukidi menuliskan bahwa Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh yang memunculkan pemikiran tentang teologi inklusif Islam di Indonesia, dalam buku tersebut Sukidi juga mengajak untuk lebih jauh menelusuri tentang teologi pluralis sebagai dasar terbentuknya sebuah demokrasi yang juga pernah dilontarkan oleh Nurcholish Madjid. Dalam buku tersebut lebih cenderung membahas tentang sistem keberagaman yang ada di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Madjid, dan tidak ada bab khusus yang membahas mengenai demokrasi.

Adapun karya ilmiah yang pernah mengkaji pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, yaitu karya Greg Barton yang diterjemahkan oleh Nanang Tahqiq “*Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid , Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*”. Dalam buku tersebut Greg Barton banyak mengulas pemikiran Abdurrahman Wahid dengan banyak tema yang berbeda-beda, seperti; latar belakang dan perjalanan hidup Abdurrahman Wahid, kecintaannya terhadap dunia pesantren, dan optimisme Abdurrahman Wahid terhadap kekuatan Islam tradisional, namun hanya sedikit sekali mengkaji mengenai pandangan Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi.

Dari uraian beberapa literatur di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pembahasan mengenai Demokratisasi di Indonesia yang mengkomparasikan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Landasan Teori

Hal yang sangat penting dalam mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid maupun Abdurrahman Wahid adalah; tidak akan lepas dari eksistensi ke-duanya sebagai seorang manusia yang memiliki gagasan-gagasan dan cita-cita sebagai respon terhadap situasi yang sedang berlangsung. Untuk itulah dalam penulisan skripsi ini menggunakan stimulator teori Ilmu Pengetahuan Islam dari Dr. Kuntowijoyo. Dalam hal ini menjelaskan bahwa konsep-konsep Islam sebenarnya perlu dipahami lebih mendalam¹³. Konsep ini dalam pemahaman Kuntowijoyo salah satunya tentang konsep *syura* yang perlu dipandang sebagai sebuah konsep perlu dikaji lebih jauh dan tidak dipandang sebagai konsep yang satu arah (Islam) akan tetapi juga dari konsep Barat (demokrasi).

Karl Mannheim dalam bukunya yang berjudul; *Teori Ideologi dan Utopia*, mengartikan ideologi sebagai ramalan tentang masa depan yang didasarkan sistem yang sekarang sedang berlaku, sedangkan Utopia berarti ramalan tentang masa depan yang didasarkan pada sistem lain, yang pada saat ini

¹³ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm.7.

sedang tidak berlangsung.¹⁴ Dengan melihat Nurcholish Madjid maupun Abdurrahman Wahid sebagai intelektual muslim yang pernah hidup pada tiga masa yang berbeda yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi dan dengan sistem yang berbeda-beda setiap masanya, telah memunculkan konsep-konsep tentang Islam dan demokrasi diterapkan dalam sebuah sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang berlangsung, dengan melihat sistem-sistem yang sedang tidak berlangsung pada saat itu, namun pernah berlangsung pada masa lalu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *biografik intelektual* sebagaimana yang diungkapkan oleh Sidi Gazalba. Pendekatan biografik adalah suatu pendekatan yang mengarah pada usaha untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan hidup dari subyek yang sedang diselidiki, pengaruh yang diterima subyek itu dalam masa kehidupannya, sifat, dan watak subyek terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan.¹⁵ Pendekatan intelektual digunakan untuk mengungkap latar belakang Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dengan pemikirannya tentang demokrasi.

¹⁴ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. xix.

¹⁵ Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Bhatara, 1996), hlm. 177.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah (*historical method*) yaitu proses menguji, menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dokumen-dokumen,¹⁶ kemudian direkonstruksikan dalam bentuk historiografi. Metode historis ini bertujuan untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan topik, baik sumber primer maupun sekunder. Dari semua sumber tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu; karya yang ditulis oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sendiri, dan karya-karya yang ditulis oleh orang lain yang menulis tentang pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, baik karya-baik berupa, buku, artikel, makalah maupun yang terdapat di situs internet.

2. Verifikasi

Verifikasi atau yang biasa disebut dengan kritik sumber. Dalam hal ini yang juga harus diuji adalah tentang keabsahan tentang keaslian sumber (otensitas) yang dilakukan melalui kritik ektern; dan keabsahan tentang

¹⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm.32

kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.¹⁷ Kritik intern dilakukan untuk meneliti kebenaran (kredibilitas) isi (data) sumber itu,¹⁸ dan menguji apakah informasi yang didapatkan baik dari buku, internet, majalah, jurnal maupun data lain tentang Nurcholish Madjid dapat dipercaya atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya lalu dilakukan *cross-check* ulang terhadap data tersebut. Dalam kritik intern akan lebih menekankan pada sumber yang didapat dari internet, karena tidak menutup kemungkinan sumber dari internet dapat berubah-ubah. Kritik ekstern adalah untuk menguji asli atau tidaknya sumber atau data yang keotentikannya dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akan didapatkan sumber atau data yang objektif. Dalam kritik ekstern ini penulis menguji dengan melihat latar belakang dari penulis.

3. Interpretasi

Interpretasi juga biasa disebut sebagai penafsiran, pengolahan, atau analisi sumber, yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi sumber agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah, sehingga penulisan benar-benar sesuai dengan tujuan.¹⁹ Tahap ini juga terkait dengan proses penelitian serta pembahasan, yaitu menganalisa segala peristiwa yang sesuai dengan pokok permasalahan dan kemudian

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Cet.II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58-59.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Transinto, 1980), hlm.135

¹⁹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1998), hlm. 19

menyimpulkan terhadap fakta-fakta yang didapatkan, sehingga memperoleh penjelasan tentang masalah demokratisasi di Indonesia menurut Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.

4. Historiografi

Dalam proses penulisan penelitian dilakukan berdasarkan sistematika yang telah dibuat oleh penulis, setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi kronologis dan analisis dari suatu peristiwa. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari beberapa tahapan dalam metode sejarah, yaitu proses yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan sumber yang diperoleh.²⁰ Historiografi ini akan diuraikan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas isi yang terkandung dalam skripsi ini nantinya, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, difokuskan pada pembahasan seputar latar belakang pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32

Indonesia, yang meliputi; latar belakang keluarga, riwayat pendidikan baik formal maupun non-formal, dan pengalaman dan karya-karya ilmiah dari kedua tokoh tersebut di atas. Bab ini dimaksudkan sebagai dasar analisis untuk menyingkap latar belakang Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid yang memunculkan gagasan demokratisasi di Indonesia.

Bab *Ketiga*, pada bab ini akan dijelaskan tentang konsep-konsep dasar pandangan Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia, kaitannya dengan hubungan demokrasi dan Islam, demokrasi dan demokrasi dan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Pada bab ini pembahasan mengenai demokratisasi di Indonesia masih bersifat umum.

Bab *Keempat*, bab ini merupakan bab inti yang akan membahas tentang pandangan kritis tentang proses demokratisasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai perbedaan maupun persamaan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia, Hubungan Demokrasi dan Islam, demokrasi dan hak asasi manusia, dan demokrasi dan supremasi hukum.

Bab *Kelima*, adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Sebagai bab penutup dari penyusunan skripsi ini yang merupakan intisari dari analisa dan uraian sebelumnya yang akan dikemas dalam bentuk kesimpulan, pada bab ini pula penyusun juga akan memasukkan saran-saran konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Abdurrahman Wahid demokrasi hanya bisa dibangun di atas landasan pendidikan yang kuat, dengan ditopang oleh tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai, Abdurrahman Wahid menggunakan pendekatan *cultural politics* dalam meretas jalan demokrasi. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid demokrasi harus dipandang sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Demokrasi adalah pro ke-arrah yang lebih maju dan baik, demokrasi identik dengan demokratisasi yang penting adalah dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus-menerus, secara dinamis dalam perkembangan dan pertumbuhan ke-arrah yang lebih baik
2. Mengenai hubungan demokrasi dan Islam, Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Islam dan pola implementasinya dalam konteks negara dan bangsa, sangat memperhatikan konteks politik dan sosiologis suatu bangsa dan masyarakat. karena ia lebih menekankan substansi ajaran Islam daripada simbol-simbol formalnya. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, Islam sendiri sebenarnya memiliki konsep tentang demokrasi, yaitu lewat ajaran yang dalam Islam disebut dengan *syuro* (musyawarah).

Mengenai hubungan demokrasi dan Hak Asasi Manusia Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa, dengan kebebasan penuh manusia akan menjadi kreatif dan produktif dan mampu menjalankan kekhalifahan, tetapi bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, namun harus sesuai dengan koridor konstitusi, oleh karena itu demokrasi menjadi suatu keharusan, dengan demokrasi memungkinkan terbentuknya pola interaksi dan relasi politik yang ideal. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, asumsi persamaan mutlak terdiri dari dua kalimat yang merupakan dalil yang tidak begitu sama, *pertama*, menyatakan bahwa semua individu mempunyai kesempatan yang sama, *kedua*, bahwa kesempatan itu tidak dimiliki oleh semua orang, hanya mereka yang memiliki kualitas tertentu.

Mengenain hubungan demokrasi dan Supremasi Hukum Abdurrahman Wahid berpendapat, bahwa untuk terwujudnya proses demokratisasi yang memungkinkan tegaknya hak asasi manusia dan pluralisme diperlukan suatu negara hukum yang menegakkan supremasi hukum dan dipenuhinya persyaratam "*The Rule of Law*" sedangkan supremasi hukum bisa berdiri jika peraturan perundang-undangan dapat berfungsi efektif. Nurcholish Madjid berpendapat, bahwa mekanisme perimbangan kekuasaan menjadi dasar semua tatanan keadilan, yang jika manusia ikut-serta dalam menegakkannya, maka akan menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan bangsanya sendiri

3. Baik Abdurrahman Wahid ataupun Nurcholish Madjid sependapat bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia, dan keduanya juga berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya mengenai hubungan demokrasi dan supremasi hukum kedua tokoh tersebut di atas sepakat bahwa, supremasi hukum mutlak diperlukan dalam suatu negara.

Letak perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu pada pandangan tentang demokrasi itu sendiri. Bagi Abdurrahman Wahid, demokrasi hanya bisa dibangun di atas landasan pendidikan yang kuat, dengan ditopang oleh tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai. Adapun menurut Nurcholish Madjid, demokrasi identik dengan demokratisasi, yang penting adalah dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus-menerus, secara dinamis dalam perkembangan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik.

Perbedaan lain dari pemikiran kedua tokoh tersebut di atas adalah pada penekanan supremasi hukum. Bagi Abdurrahman Wahid supremasi hukum sangat diperlukan, dan supremasi hukum bisa berdiri jika peraturan perundang-undangan dapat berfungsi efektif. Adapun menurut Nurcholish Madjid hubungan antara supremasi hukum dan demokrasi adalah semacam “kontrak sosial” antara seluruh elemen masyarakat yang mengikat dan harus dipatuhi bersama.

B. Saran-saran

1. Dalam rangka menjembatani, banyaknya kepentingan dan kemajemukan warga negara Indonesia, maka demokrasi adalah suatu sistem yang tepat bagi suatu negara yang memiliki penduduk dengan multi ras, etnik, golongan, agama dan lain sebagainya.
2. Demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam sendiri pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW telah menerapkan demokrasi dalam kepemimpinannya di Madinah
3. Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat kurang karena keterbatasan kami, karenanya guna penyempurnaan skripsi ini, kritik maupun saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Masykuri, *Demokarasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Cet, II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Abidan, Zainal Thoha dan M. Aman Musthofa, *Membangun Bangsa Kerakyatan; Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan NU*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997
- Alfian, M.Alfan, *Mahalnya Harga Demokrasi; Catatan Atas dinamika Transisi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Naik dan Jatuhnya Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Intrans, 2001
- Amir Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca- Soeharto*, Cet. 1, Jakarta: LP3ES, 2003
- Anwar M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1995
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid , Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, Yogyakarta; LKiS, 2002
- Budiarjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Dannel,Guillermo O” dan Pholippe C. Shimtter, *Transisi Menuju Demokrasi; Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, terj, Nurul Agustina Jakarta: LP3ES, 1993
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformsi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Fariz, Muhammad Abdul Qodir Abu, *Sistem Politik Islam*, trj, Musthalah Maufur, MA, Cet. I, Jakarta: Robbani Press, 2000
- Fatah, Eep Saifullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- _____, *Menuntaskan Perubahan (1); Catatan Poitik 1998-1999*, Bandung: Mizan, 2000

- _____, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru; Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*, Bandung: Rosdakarya, 2000
- _____, *Zaman Kesempitan; Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, Bandung: Mizan, 2000
- Gazalaba, Sidi, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta: Bhatara, 1996.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1985.
- Haris, Syamsudin, *Demokrasi di Indonesia; Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1994
- Hasbi, Artani, *Musyawah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus Af, (ed), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 2005
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin politik Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Khalik, Ridwan Nur, *Pluralisme Borjuis Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Gallang Press, 2003
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- _____, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1997
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987
- _____, *Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997
- _____, *Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal Sebagai Pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan*” dalam Elsa Taher (ed), *Demokrasi Politik, Rakyat dan Ekonomi;Pengalaman Indonesia Masa Orde baru*, Jakarta: Paramadina, 1994
- _____, *Islam dan Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995

- _____, *Masyarakat Religius*, Jakrta: Paramadina, 1997
- _____, “Suatu Tinjauan Atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan” Paramadina. Vol I, Juli-Desember 1998
- _____, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999Malik, Dedy Jamuludin dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia; Pemikiran dan Aksi Politik*, Bandung: Zaman Wacana Ilmu, 1998
- _____, *Indonesia Kita*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mahfudz, Moh. MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999
- Muhammad Goenawan dan Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Ma'mun Murod, Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rais Amien, *Amien Rais Menuntut Perubahan*, Cet. 1, Yogyakarta: PenaCendikia, 1998
- _____, *Keajaiban Kekuasaan*, Cet. 1, Yogyakarta: Benteng dan PPSK, 1994
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1998.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Transinto, 1980.
- Syafii, Maarif Ahmad, *Islam dan Politik diIndonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1960*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988
- _____, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, Cet. 1, Bandung: PT. Mizan, 2009.
- Syamsudin,M. Din, *Islam dan Politik Orde Baru*, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000
- Syam, Firdaus, *Amien Rais dan Yuzril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modeern*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003

Thaha, Idris, "Kata Pengantar", Azzumardi Azra, *Demokrasi Religius, Pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amin Rais*, Jakarta: Tereja, PT. Mizan Publika, t.t

Wahid, Abdurrahman, "Pancasila dan Liberalisme" teks untuk Kompas, 30 Mei 1987

_____, "Sekali Lagi Tentang Demokrasi" editor No. 36 th, iv, 25 Mei 1991

_____, *Membangun Demokrasi*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1999

_____, "Islam, Pluralisme, dan Demokrasi" dalam Arief Afandi (ed), *Islam, Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999 Abdurrahman Wahid, "Pancasila dan Liberalisme" teks untuk Kompas, 30 Mei 1987

Al-Zastrow Ng, *Gus Dur, Siapa Sih Sampean?; Tafsir Teoritis Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta: Erlangga, 1999.

<http://www.beritaindonesia.co.id/lentera/al-zaytun-terbitkan-ensiklopedi-nurcholish-madjid>, di akses tanggal 20 juli 2010

<http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3078064> di akses tanggal 20 juli 2010

<http://bienay.wordpress.com/2009/05/12/biodata-presiden-abdurrahman-wahid>, di akses tanggal 20 juli 2010

¹ <http://www.republika.co.id/> di akses tanggal 20 juli 2010

CURICULUM VITAE

Nama : Sapta Wahyono
Tempat/Tanggal/Lahir : Yogyakarta, 30 april 1986
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bandeng 3 No. 16, Ngaglik, Sleman yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SDN II Minomartani III, Lulus Tahun 1998
2. SMP Depok II Condongcatur, Lulus Tahun 2001
3. MAN Maguwoharjo, Lulus Tahun 2004
4. Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus Tahun 2010

Nama Orangtua:

1. Ayah : Kamsuri Hemidjaja (alm)
2. Ibu : Zullaidar